

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162-2184.
- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1-14.
- Al Ayyuuby, M. (2021). *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Agus Tri Basuki., dan Nano Prawoto. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis.
- Aswar, K., Fanany, A. Y., Sumardjo, M., Wiguna, M., & Hariyani, E. (2022). Determinant factors on the disclosure level of local government's financial statements in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 1-9.

- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? Riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan. (n.d.).
<https://sulsel.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>.
- Cohen, S and N Kaimenakis. (2008). An Empirical Investigation of Greek Municipalities' Quality of Financial Reporting. Working paper series.
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: Annual Report of Effects of Determinants and Moderators. *Academy of Management Journal*, Vol.34: 555-590.
- Dwirandra. (2008). "Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otono Kabupaten/Kota Di Propinsi BaliTahun 2002-2006", Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Lex, Donaldson & James, H. David. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*, 16(1). 49-64.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71-80.
- Febriani, U., & Harahap, J. P. J. (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di

- Indonesia. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 9-17.
- Ghozali, Imam (2016) "Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SSS 23", BP UNDIP, Semarang.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1-26.
- Hilmi, A. Z., & D, Martani. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15: 13-20.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Hidayat, A. 2014. Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel. <https://exsight.id/blog/2022/03/31/perbedaan-regresi-linear-berganda-panel/>
- Halim, Abdul, dan Abdullah, Syukriy. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1 pp 53-64. 2007.
- Jones, Rowan. (1992). The Development of Conceptual Frameworks of Accounting for The Public Sector. *Journal Financial Accounting and Management*. Vol. 8: 249-264.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan

- laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Kasijan. (2009). *Perbedaan Persepsi Antara Stakeholders Terhadap Dukungan Pejabat Dalam Penerapan SAP, Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Kulon Progo)*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(10).
- Marsella, C. & Aswar, K. (2019). An Investigation of Financial Statement Disclosure in Local Government Financial Statements. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 4(6), 273–281.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Jogyakarta: Andi Martani, Dwi dan Annisa Lestiani. (2012). Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance* 3 (1): 67 - 84.
- Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T. (2014). Disclosure of non-financial information about public services on the official website of local governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 66(2), 500-512.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit

- terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang). *Jurnal WRA*, 3(1), 529-548.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128.
- Nurlaelah, N. (2018). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111-1130.
- Patrick, Patricia A. (2010). The Adoption of GASB 34 In Small, Rural, Local Governments. *J Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Peraturan Menteridalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Permada, Romi. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463.

Patrick, P. A. (2007). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Rahmayanti, D. 2018. *Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 429-437.

Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020, October). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. In *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)* (pp. 1-6). Atlantis Press.

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahayu, A. (2016). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan)*. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54-70.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko., Lesmana, Sigit, Indra. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia”, *Jurnal STIE Bank BDP Jateng*.
- Suripto, Bambang. (1999). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. *Symposium Nasional Akuntansi II*.
- Simamora, R., & A, Halim. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2): 29-43

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. (Ayub, Ed.).
Yogyakarta: *Literasi Media Publishing*.
- Undang-Undang RI* No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI* No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI* No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI* No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang RI* No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan
Negara
- Undang-Undang RI* No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI* No. 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan
dan belanja negara
- Undang-Undang RI* No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- Wibisono, Y. (2005). Metode statistik. Gajah Mada University,
Yogyakarta.
- Yulianingtyas, R. R. (2010). “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah*”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Yusuf, M. (2010). Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju
pengelolaan keuangan daerah terbaik. Yogyakarta, Salemba
Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar Riwayat Hidup**BIODATA****A. Data Pribadi**

1. Nama : Nurul Izzah Mahyuddin
2. Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 26 Mei 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah : Jl Sastra II Kompleks unhas antang
5. Telepon rumah dan HP : 085657194654
6. Alamat *E-mail* : nurulizzahmhyuddin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan**Pendidikan Formal**

1. Tamat SD tahun 2013 di SD Inpres Perumnas Antang 1
2. Tamat SMP tahun 2016 di SMP Islam Athirah Baruga
3. Tamat SMA tahun 2019 di SMA 5 Gowa

Pendidikan Non Formal

1. Pelatihan Basic Learning Skills, Character, & Creativity (BALANCE)
Universitas Hasanuddin
2. Bina Kader Mahasiswa Akuntansi (BKMA) XXIV IMA FEB-UH

C. Pengalaman Kerja dan Organisasi**Organisasi**

- Koordinator Departemen Kesekretariatan dan Publikasi Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-UH (2022).

Magang

- Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA) BUMN Batch I & II
(Juli 2023- April 2024)

Demekian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 4 Februari 2024



Nurul Izzah Mahyuddin

LAMPIRAN 2. Penelitian Terdahulu

| No | Nama penulis | Judul penelitian | Variabel | Hasil penelitian |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawan (2018) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) • Ukuran Legislatif (X2) • Kekayaan Pemerintah Daerah (X3) • Intergovernmental Revenue (X4) • Umur Administratif(X5) • Diferensiasi Fungsional (X6) • Spesialisasi Pekerjaan (X7) • Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X8) • Tingkat Pengungkapan | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Ukuran Legislatif (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Kekayaan Pemerintah Daerah (X3) Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Intergovernmental Revenue (X4) Berpengaruh Negatif |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | | Laporan Keuangan (Y) | <p>Terhadap Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umur Administratif(X5) Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Diferensiasi Fungsional (X6) Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Spesialisasi Pekerjaan (X7) Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X8) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y |
| 2 | Winda Meiliza Putri dan Fefri Indra Arza (2019) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi | • Ukuran pemerintah daerah (X1) | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umur Pemerintah Daerah (X2) • Jumlah SKPD (X3) • Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah (X4) • Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah (X5) • Kekayaan Pemerintah Daerah (X6) • Opini audit (X7) • Tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan pemerintah daerah (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintah Daerah (X2) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Jumlah Skpd (X3) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Ketergantungan (X4) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (X5) Tidak Berpengaruh |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | | <p>Terhadap Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Pemerintah Daerah (X6) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Opini Audit (X7) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y |
| 3 | Fikrinah Naopal, Sri Rahayu, dan Siska Priyandani Yudowati (2017) | <p>Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintahan Daerah (X1) • Umur Pemerintahan Daerah (X2) • Jumlah Penduduk (X3) • Temuan Audit (X4) • Opini Audit (X5) • Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintahan Daerah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintahan Daerah (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Jumlah Penduduk |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | (X3) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Temuan Audit (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Opini Audit (X5) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y |
| 4 | Dekeng Setyo Budiarto dan Lukis Indarti (2019) | Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah | • Ukuran pemerintah daerah (X1) • Umur pemerintah daerah (X2) • Jumlah penduduk (X3) • Temuan audit (X4) • Opini audit (X5) • Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintah Daerah (X2) Berpengaruh Negatif Terhadap Variabel Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk (X3) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Temuan Audit (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Opini Audit (X5) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y | |
| 5 | Lestavira Finakesti , Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022) | Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (PAD) (X1) • Tingkat Ketergantungan (X2) • Rasio Kemandirian (X3) • Jumlah OPD (X4) • Ukuran Legislatif (X5) • Tingkat pengungka | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (Pad) (X1) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Ketergantungan (X2) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Rasio Kemandirian |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | pan LKPD (Y) | (X3) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Jumlah Opd (X4) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Ukuran Legislatif (X5) Berpengaruh Terhadap Variabel Y |
| 6 | Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012) | Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan | • Ukuran Pemda (X1) • Jumlah anggota DPRD (X2) • Umur administrati f (X3) • Kekayaan Pemda (X4) • Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (X5) • Latar belakang | Hasil Penelitian Menyatakan Bawa: • Ukuran Pemda (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Ukuran Legislatif Dprd (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Umur Administratif (X3) |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>pendidikan Kepala Daerah (X6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio kemandirian (X7) • Intergovernmental revenue (X8) • tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) | <p>Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Pemda (X4) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Diferensiasi Fungsional (X5) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Spesialisasi Pekerjaan (X6) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Rasio Kemandirian (X7) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Intergovernmental Revenue (X8) Berpengaruh Negatif |
|--|--|--|---|

| | | | | Terhadap Variabel Y |
|---|---|--|---|--|
| 7 | Edo Anggara dan Charoline Cheisviyanny (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (X1) • Ukuran Pemerintah Daerah (X2) • Tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X3) • Temuan Audit (X4) • Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y) | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Ukuran Pemerintah Daerah (X2) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X3) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: |
| 8 | Era Fatwa Amaliah dan Haryanto (2019) | Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ketergantungan daerah (X1) • PAD (X2) • Belanja modal (X3) • Populasi (X4) • Temuan Audit (X5) • Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ketergantungan daerah (X1) Terhadap Variabel Y • Pad (X2) Tidak Berpengaruh • Belanja modal (X3) Terhadap Variabel Y • Belanja Modal (X3) Berpengaruh • Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) Positif Terhadap Variabel Y • Populasi (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Temuan Audit (X5) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: |
| 9 | Meri Andriani, Elfitri Santi, dan Rasyidah Mustika (2019) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016 | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) • Tingkat Ketergantun gan (X2) • Umur Pemerintah Daerah (X3) • Ukuran Legislatif (X4) • Jumlah Penduduk (X5) • Pendapata n Asli Daerah (X6) • Diferensiasi Fungsional (X7) • Belanja Modal (X8) • Tingkat Pengungka pan LKPD (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Ketergantun gan (X2) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintah Daerah (X3) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Legislatif (X4) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Jumlah Penduduk (X5) Berpengaruh |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | <p>Terhadap Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (X6) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Diferensiasi Fungsional (X7) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Belanja Modal (X8) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y |
| 10 | Meli Marliani, Moh. Amin, dan M. Cholid Mawardi (2018) | <p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (X1) • Tingkat Ketergantungan (X2) • Total Asset (X3) • Umur Pemerintahan (X4) • Jumlah SKPD (X5) | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Tingkat Ketergantungan (X2) Tidak Berpengaruh |

| | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Legislatif (X6) • Temuan Audit (X7) • Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) | <ul style="list-style-type: none"> Terhadap Variabel Y • Total Asset (X3) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintahan (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Jumlah Skpd (X5) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Ukuran Legislatif (X6) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Temuan Audit (X7) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y |
| 11 | Dina Rahmayanti (2018) | Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah (X1) | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----|---|--|
| | | Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia | Di | <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (X2) • Jumlah SKPD (X3) • Umur Pemerintah Provinsi (X4) • Temuan Audit (X5) • Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Kekayaan Daerah (X2) Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Jumlah Skpd (X3) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Umur Pemerintah Provinsi (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y • Temuan Audit (X5) Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y |
| 12 | M Ridwan dan M Rizal Yahya (2020) | Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja | | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan Daerah (X1) | Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantun |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Temuan Audit BPK (X2) • Jumlah SKPD (X3) • Ukuran Legislatif (X4) • Tingkat Pengungkapan LKPD (Y) | <p>gan Daerah (X1) Berpengaruh Terhadap Variabel Y</p> <p>• Temuan Audit Bpk (X2)</p> <p>Berpengaruh Terhadap Variabel Y</p> <p>• Jumlah Skpd (X3) Berpengaruh Terhadap Variabel Y</p> <p>• Ukuran Legislatif (X4) Berpengaruh Terhadap Variabel Y</p> |
| 13 | Amiruddin Hilmi dan Dwi Martani (2012) | Zul | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (X1) • Tingkat Ketergantungan (X2) • Total Aset (X3) • Jumlah Penduduk (X4) <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah (X1) Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SKPD (X5) • Jumlah Temuan (X6) • Tingkat Penyimpanan (X7) • Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi (Y) | <p>Pemerintah Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan (X2) Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. • Total Aset (X3) Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. • Jumlah Penduduk (X4) Berhubungan Positif Dan Signifikan Terhadap Tingkat |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Pengungkap an Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Skpd (X5) Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkap an Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.• Jumlah Temuan (X6) Berhubunga n Tidak Signifikan Mempengaru hi Tingkat Pengungkap an• Tingkat Penyimpang an (X7) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Pengungkap an Laporan |
|--|--|--|--|--|

| | | | | Keuangan Pemerintah Provinsi. |
|----|---|--|--|---|
| 14 | Syamsuri Rahim, Hamzah Ahmad, Muslim Muslim, dan Andi Nursadirah (2020) | Disclosure Of Local Government Financial Statements In South Sulawesi | <ul style="list-style-type: none"> • Level of regional (X1) • Level of regional dependency (X2) • Total assets (X3) • Population (X4) • Number of SKPD (X5) • Number of audit findings (X6) • Level of disclosure (Y) | <p>Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level Of Regional (X1) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Level Of Regional Dependency (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y • Total Assets (X3) Berpengaruh Negatif Terhadap Variabel Y • Population (X4) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Number Skpd (X5) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y• Number Of Audit Findings (X6) Berpengaruh Positif Terhadap Variabel Y |
|--|--|--|--|--|

LAMPIRAN 2. Tabulasi Data Penelitian

| Kabupaten | Periode | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|------------------------------------|---------|-------|------|----|----|------|-----|-------|
| Kabupaten Bulukumba | 2019 | 88.24 | 2.47 | 46 | 9 | 0.13 | 419 | 33.96 |
| Kabupaten Bulukumba | 2020 | 89.71 | 2.60 | 40 | 14 | 0.13 | 438 | 33.34 |
| Kabupaten Bulukumba | 2021 | 88.24 | 2.68 | 46 | 5 | 0.13 | 440 | 36.06 |
| Kabupaten Enrekang | 2019 | 83.82 | 1.91 | 41 | 9 | 0.09 | 207 | 35.28 |
| Kabupaten Enrekang | 2020 | 83.82 | 2.01 | 43 | 24 | 0.07 | 225 | 33.54 |
| Kabupaten Enrekang | 2021 | 88.24 | 2.21 | 43 | 7 | 0.06 | 228 | 36.06 |
| Kabupaten Gowa | 2019 | 80.88 | 3.90 | 54 | 10 | 0.14 | 761 | 27.50 |
| Kabupaten Gowa | 2020 | 83.82 | 4.05 | 54 | 18 | 0.17 | 766 | 28.20 |
| Kabupaten Gowa | 2021 | 89.71 | 4.25 | 54 | 10 | 0.17 | 773 | 30.44 |
| Kabupaten Jeneponto | 2019 | 80.88 | 2.26 | 44 | 25 | 0.08 | 364 | 27.74 |
| Kabupaten Jeneponto | 2020 | 82.35 | 2.36 | 44 | 21 | 0.09 | 402 | 25.70 |
| Kabupaten Jeneponto | 2021 | 77.94 | 2.38 | 44 | 10 | 0.09 | 406 | 27.26 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 2019 | 77.94 | 2.10 | 45 | 14 | 0.09 | 134 | 47.99 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 2020 | 77.94 | 2.10 | 45 | 21 | 0.08 | 137 | 46.73 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 2021 | 79.41 | 2.11 | 38 | 6 | 0.06 | 138 | 49.54 |
| Kabupaten Luwu Timur | 2019 | 69.12 | 3.17 | 39 | 8 | 0.26 | 294 | 71.34 |
| Kabupaten Luwu Timur | 2020 | 72.06 | 3.30 | 39 | 11 | 0.30 | 297 | 72.85 |
| Kabupaten Luwu Timur | 2021 | 75.00 | 3.33 | 39 | 7 | 0.26 | 301 | 78.58 |
| Kabupaten Maros | 2019 | 76.47 | 3.02 | 44 | 10 | 0.20 | 352 | 64.60 |
| Kabupaten Maros | 2020 | 76.47 | 3.27 | 44 | 10 | 0.19 | 392 | 47.73 |
| Kabupaten Maros | 2021 | 77.94 | 3.35 | 45 | 4 | 0.19 | 397 | 47.88 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 2019 | 72.06 | 2.20 | 50 | 11 | 0.15 | 335 | 77.68 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 2020 | 70.59 | 2.07 | 50 | 13 | 0.17 | 346 | 74.38 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 2021 | 60.29 | 2.00 | 50 | 7 | 0.14 | 348 | 79.19 |
| Kabupaten Pinrang | 2019 | 67.65 | 2.87 | 42 | 8 | 0.00 | 377 | 52.10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|------|----|----|------|-----|-------|
| Kabupaten Pinrang | 2020 | 72.06 | 3.00 | 43 | 9 | 0.12 | 404 | 49.84 |
| Kabupaten Pinrang | 2021 | 72.06 | 3.05 | 43 | 7 | 0.12 | 407 | 53.41 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 2019 | 73.53 | 2.67 | 35 | 8 | 0.10 | 299 | 46.49 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 2020 | 79.41 | 2.61 | 40 | 10 | 0.12 | 320 | 44.12 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 2021 | 82.35 | 2.58 | 40 | 7 | 0.12 | 323 | 47.19 |
| Kabupaten Soppeng | 2019 | 79.41 | 2.33 | 37 | 16 | 0.13 | 229 | 47.83 |
| Kabupaten Soppeng | 2020 | 77.94 | 2.26 | 34 | 12 | 0.16 | 235 | 48.42 |
| Kabupaten Soppeng | 2021 | 75.00 | 2.42 | 34 | 6 | 0.15 | 236 | 52.75 |
| Kabupaten Tana Toraja | 2019 | 67.65 | 3.59 | 54 | 13 | 0.13 | 236 | 31.66 |
| Kabupaten Tana Toraja | 2020 | 64.71 | 3.40 | 52 | 16 | 0.12 | 281 | 27.10 |
| Kabupaten Tana Toraja | 2021 | 70.59 | 3.50 | 52 | 13 | 0.08 | 285 | 28.36 |
| Kota Palopo | 2019 | 75.00 | 2.25 | 49 | 10 | 0.18 | 181 | 43.79 |
| Kota Palopo | 2020 | 75.00 | 2.31 | 49 | 14 | 0.21 | 185 | 43.66 |
| Kota Palopo | 2021 | 75.00 | 2.45 | 49 | 6 | 0.16 | 187 | 46.52 |
| Kota Parepare | 2019 | 77.94 | 2.19 | 33 | 11 | 0.17 | 144 | 50.06 |
| Kota Parepare | 2020 | 77.94 | 2.17 | 33 | 13 | 0.25 | 151 | 48.50 |
| Kota Parepare | 2021 | 79.41 | 2.25 | 33 | 13 | 0.22 | 153 | 51.18 |

Ket:

Y : Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

X1: Total Aset (dalam Triliun)

X2: Jumlah SKPD

X3: Jumlah Temuan (Atas SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan)

X4: Rasio Kemandirian

X5: Jumlah Populasi (dalam ribuan)

X6: Tingkat Kesejahteraan (dalam juta)

LAMPIRAN 3. Hasil Penelitian

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Sum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------|----|---------|---------|----------|----------|----------------|
| Total Aset | 42 | 1.91 | 4.25 | 113.00 | 2.6905 | .61019 |
| SKPD | 42 | 33.00 | 54.00 | 1833.00 | 43.6429 | 6.21886 |
| Jumlah Temuan | 42 | 4.00 | 25.00 | 476.00 | 11.3333 | 4.92216 |
| Audit | 42 | .00 | .30 | 5.98 | .1424 | .06140 |
| Rasio Kemandirian | 42 | 134.00 | 773.00 | 13533.00 | 322.2143 | 155.60935 |
| Jumlah Populasi | 42 | 25.70 | 79.19 | 1946.55 | 46.3464 | 15.27915 |
| Kesejahteraan | 42 | 60.29 | 89.71 | 3245.59 | 77.2760 | 6.68966 |
| Tingkat Pengungkapan | 42 | | | | | |
| Valid N (listwise) | 42 | | | | | |

Descriptive Statistics

| | N | Range | Varianc e | Skewness | | Kurtosis | |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | Statisti c | Statisti c | Statistic | Statistic | Std. Error | Statisti c | Std. Error |
| Total Aset | 42 | 2.34 | .372 | .888 | .365 | -.119 | .717 |
| SKPD | 42 | 21.00 | 38.674 | -.013 | .365 | -.787 | .717 |
| Jumlah Temuan | 42 | 21.00 | 24.228 | 1.137 | .365 | 1.115 | .717 |
| Audit | 42 | .30 | .004 | .434 | .365 | .399 | .717 |
| Rasio Kemandirian | 42 | 639.00 | 24214.2 | 1.509 | .365 | 2.826 | .717 |
| Jumlah Populasi | 42 | 53.49 | 233.452 | .706 | .365 | -.143 | .717 |
| Kesejahteraan | 42 | 29.42 | 44.752 | -.124 | .365 | .087 | .717 |
| Tingkat Pengungkapan | 42 | | | | | | |
| Valid N (listwise) | 42 | | | | | | |

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

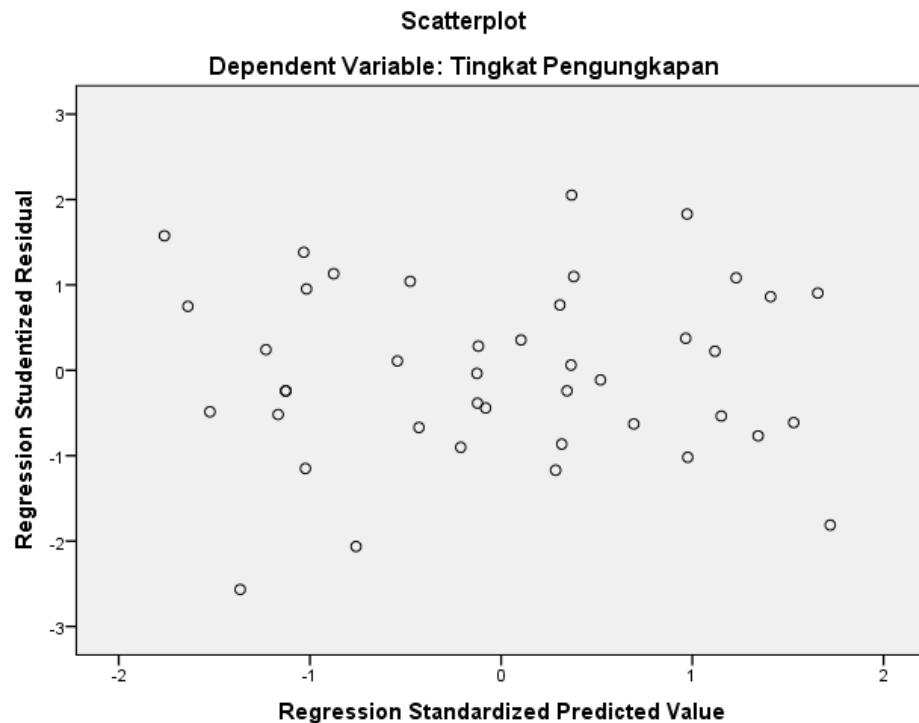
| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | | |
| N | | | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | |
| Normal Parameters ^a ^b | Mean | | 77.276 0 | 2.690 5 | 43.642 9 | 11.333 3 | .1424 | 322.214 3 | 46.3464 | | |
| | Std. Deviation | | 6.6896 6 | .6101 9 | 6.2188 6 | 4.9221 6 | .0614 0 | 155.609 35 | 15.2791 5 | | |
| Most Extreme Differences | Absolute | | .089 | .165 | .091 | .154 | .104 | .153 | .155 | | |
| | Positive | | .089 | .165 | .080 | .154 | .104 | .153 | .155 | | |
| | Negative | | -.087 | -.105 | -.091 | -.092 | -.072 | -.113 | -.092 | | |
| Test Statistic | | | .089 | .165 | .091 | .154 | .104 | .153 | .155 | | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | .200 ^{c,d} | .006 ^c | .200 ^{c,d} | .013 ^c | .200 ^{c,d} | .015 ^c | .012 ^c | | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | | .858 ^e | .181 ^e | .840 ^e | .247 ^e | .717 ^e | .256 ^e | .242 ^e | | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | .849 | .171 | .831 | .236 | .705 | .245 | .231 | | |
| | | Upper Bound | .867 | .190 | .850 | .258 | .728 | .267 | .253 | | |
| a. Test distribution is Normal. | | | | | | | | | | | |
| b. Calculated from data. | | | | | | | | | | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | | | | | | | | | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | | | | | | | | | | |
| e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 329836257. | | | | | | | | | | | |
| Coefficients ^a | | | | | | | | | | | |

2. Uji Multikolinearitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|
| | B | Std. Error | Beta | | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 112.23 1 | 7.460 | | | 15.045 | .000 | | |
| Total Aset | -6.477 | 1.958 | -.591 | | -3.307 | .002 | .384 | 2.604 |
| SKPD | -.341 | .146 | -.317 | | -2.326 | .026 | .661 | 1.513 |
| Jumlah Temuan Audit | -.135 | .170 | -.099 | | -.791 | .434 | .781 | 1.280 |
| Rasio Kemandirian | 33.038 | 15.929 | .303 | | 2.074 | .045 | .573 | 1.744 |
| Jumlah Populasi Kesejahteraan | .028 -.317 | .007 .066 | .640 -.725 | | 3.906 -4.837 | .000 .000 | .456 .546 | 2.193 1.832 |

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

3. Uji Heteroskedastisitas



HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINIER

1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .756 ^a | .571 | .498 | 4.74147 |

a. Predictors: (Constant), Kesejahteraan, Total Aset, Jumlah Temuan Audit, SKPD, Rasio Kemandirian, Jumlah Populasi

b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

2. Uji Hipotesis

- **Uji Statistik F**

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 1047.957 | 6 | 174.660 | 7.769 | .000 ^b |
| | Residual | 786.855 | 35 | 22.482 | | |
| | Total | 1834.812 | 41 | | | |

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

b. Predictors: (Constant), Kesejahteraan, Total Aset, Jumlah Temuan Audit, SKPD, Rasio Kemandirian, Jumlah Populasi
 Sumber: *Output SPSS 23*, Data sekunder telah diolah

- **Uji Statistic t**

| Model | Coefficients ^a | | | | | | Collinearity Statistics |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-----------|-------------------------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | |
| | B | Std. Error | Beta | | | VIF | |
| 1 (Constant) | 112.231 | 7.460 | | 15.045 | .000 | | |
| Total Aset | -6.477 | 1.958 | -.591 | 3.307 | .002 | .384 | 2.604 |
| SKPD | -.341 | .146 | -.317 | 2.326 | .026 | .661 | 1.513 |
| Jumlah Temuan Audit | -.135 | .170 | -.099 | -.791 | .434 | .781 | 1.280 |
| Rasio Kemandirian | 33.038 | 15.929 | .303 | 2.074 | .045 | .573 | 1.744 |
| Jumlah Populasi | .028 | .007 | .640 | 3.906 | .000 | .456 | 2.193 |
| Kesejahteraan | -.317 | .066 | -.725 | 4.837 | .000 | .546 | 1.832 |

b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan
 Sumber: *Output SPSS 23*, Data sekunder telah diolah

LAMPIRAN 4. Tabel Item Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nama Kabupaten/Kota :

| No | Item Pengungkapan Wajib | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|
| | PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN | | | |
| 1 | - Laporan Realisasi Anggaran | | | |
| 2 | - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | | | |
| 3 | - Neraca | | | |
| 4 | - Laporan Operasional | | | |
| 5 | - Laporan Arus Kas | | | |
| 6 | - Laporan Perubahan Ekuitas | | | |
| 7 | - Catatan atas Laporan Keuangan | | | |
| | PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS | | | |
| 8 | - Laporan Keuangan | | | |
| 9 | - Akuntansi Anggaran | | | |
| 10 | - Akuntansi Pendapatan-LRA | | | |
| 11 | - Akuntansi Belanja | | | |
| 12 | - Akuntansi Surplus/Defisit-LRA | | | |
| 13 | - Akuntansi Pembiayaan | | | |
| 14 | - Akuntansi Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 15 | - Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 16 | - Akuntansi Pembiayaan Neto | | | |
| 17 | - Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | | | |
| | PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS | | | |
| 18 | - Aktivitas Operasi | | | |
| 19 | - Aktivitas Investasi | | | |
| 20 | - Aktivitas Pendanaan | | | |
| 21 | - Aktivitas Transitoris | | | |
| | PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | | | |
| 22 | - Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi | | | |
| 23 | - Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan Dan Ekonomi Makro | | | |
| 24 | - Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target | | | |
| 25 | - Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Asumsi Dasar Akuntansi • Pengguna Laporan Keuangan | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | • Kebijakan Akuntansi | | | |
| 26 | - Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan | | | |
| 27 | - Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan | | | |
| 28 | - Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya | | | |
| | PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN | | | |
| 29 | - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan | | | |
| 30 | - Penjelasan lebih lanjut persediaan | | | |
| 31 | - Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang | | | |
| | PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI | | | |
| 32 | - Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi | | | |
| 33 | - Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen | | | |
| 34 | - Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang | | | |
| 35 | - Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut | | | |
| 36 | - Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya | | | |
| 37 | - Perubahan pos investasi | | | |
| | PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP | | | |
| 38 | - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) | | | |
| 39 | - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode (yang menunjukkan Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada Mutasi aset tetap lainnya) | | | |
| 40 | - Informasi penyusutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai penyusutan, • Metode penyusutan yang digunakan, • Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, • Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode) | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 41 | - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap | | | |
| 42 | - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap | | | |
| 43 | - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi | | | |
| 44 | - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap | | | |
| 45 | - Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: <ul style="list-style-type: none">• Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap• Tanggal efektif penilaian kembali• Jika ada, nama penilai independen• Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti• Nilai tercatat setiap jenis aset tetap | | | |
| 46 | - Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud | | | |
| PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | | | | |
| 47 | - Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya | | | |
| 48 | - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya | | | |
| 49 | - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar | | | |
| 50 | - Uang muka kerja yang diberikan | | | |
| 51 | - Retensi | | | |
| PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN | | | | |
| 52 | - Daftar skedul utang | | | |
| 53 | - Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman | | | |
| 54 | - Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya | | | |
| 55 | - Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 56 | - Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo | | | |
| 57 | - Perjanjian restrukturisasi utang | | | |
| 58 | - Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur | | | |
| 59 | - Biaya pinjaman | | | |
| | PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN | | | |
| 60 | - Nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing | | | |
| | PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL | | | |
| 61 | - Akuntansi Pendapatan-LO | | | |
| 62 | - Akuntansi Beban | | | |
| 63 | - Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional | | | |
| 64 | - Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | | | |
| 65 | - Pos Luar Biasa | | | |
| 66 | - Surplus/Defisit-LO | | | |
| 67 | - Transaksi Dalam Mata Uang Asing | | | |
| 68 | - Transaksi Pendapatan-LO Dan Beban Berbentuk Barang Dan Jasa | | | |

DAFTAR POINT PENGUNGKAPAN LAORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| Kabupaten Bulukumba | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tahun | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| Tahun | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kabupaten Enrekang | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Tahun | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tahun | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kabupaten Gowa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Tahun | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tahun | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | | |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Kabupaten Jeneponto | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

| Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tahun | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| Kabupaten Toraja Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tahun | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |